

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia juga merupakan negara berkembang yang saat ini berada dalam tahap pembangunan di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kesejahteraan umum demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia dalam mewujudkan pembangunan tersebut memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan

masyarakat, hal ini merupakan dasar pelaksanaan otonomi kepada daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berarti penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan umum. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah menjadi lebih mandiri.

Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk pembangunan daerah serta digunakan untuk membiayai kegiatan belanja daerah, (Siahaan, 2005:15). Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menjadi semakin luas, termasuk di dalamnya yaitu upaya-upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai

sumber pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dan kemandirian suatu daerah. Pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari sektor retribusi daerah. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak, merupakan salah satu Pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat, (Yani, 2008:63). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.” Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga disebutkan bahwa jenis retribusi dibagi menjadi

tiga golongan, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Perbedaan yang mencolok dari pajak daerah dengan retribusi daerah adalah pada pajak daerah kontraprestasi pemerintah tidak dapat ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada retribusi daerah kontraprestasi dapat ditunjukkan secara langsung yaitu melalui jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah, (Soebechi, 2012:125). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan ditempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, di mana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah adalah Kota Blitar. Kota Blitar menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Kota Blitar yang biasa dikenal sebagai kota Proklamator memiliki daya tarik tersendiri bagi tujuan pariwisata di Jawa Timur, karena memiliki nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia yaitu terdapat makam mantan Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno. Pemerintah daerah Kota Blitar memberikan wewenang kepada DPKD (Dinas Pengelola Keuangan Daerah) untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. DPKD Kota Blitar berfungsi

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah, oleh karena itu DPKD Kota Blitar menjadi sentral informasi mengenai retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya Kota Blitar. Data pendapatan asli daerah Kota Blitar, kontribusi retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar serta kenaikan dan penurunan retribusi daerah Kota Blitar periode tahun 2008-2012 disajikan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar.**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD ( Rp )</b>	<b>Realisasi PAD ( Rp )</b>	<b>Efektivitas ( % )</b>
2008	39.715.286.321	40.809.908.439	102,76%
2009	33.441.682.984	39.860.842.246	119,20%
2010	46.856.490.224	47.690.974.775	101,78%
2011	54.018.529.211	52.598.069.707	97,37%
2012	55.966.506.014	63.621.643.039	113,68%

Sumber : DPKD Kota Blitar (*data diolah*)

**Tabel 2. Target dan Realisasi penerimaan retribusi daerah Kota Blitar.**

Tahun	Target retribusi daerah (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	Kenaikan/Penurunan		Efektivitas %
			Rp	%	
2008	20.731.931.084	20.563.760.214			99,19%
2009	21.815.573.505	24.234.935.749	3.671.175.535	17,85%	111,09%
2010	7.117.676.800	6.649.853.795	-17.585.081.954	-72,56%	93,43%
2011	7.031.900.763	6.687.731.370	37.877.575	0,57%	95,11%
2012	7.662.957.438	6.899.399.102	211.667.732	3,17%	90,04%

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

**Tabel 3. Kontribusi retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar.**

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah (Rp)	Realisasi retribusi daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2008	40.809.908.439	20.563.760.214	50,39%
2009	39.860.842.246	24.234.935.749	60,80%
2010	47.690.974.775	6.649.853.795	13,94%
2011	52.598.069.707	6.687.731.370	12,71%
2012	63.621.643.039	6.899.399.102	10,84%

Sumber : DPKD Kota Blitar (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan pendapatan asli daerah Kota Blitar mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat pada realisasi tahun 2009 sebesar Rp.24.234.935.749 mengalami kenaikan sebesar 17,85% atau Rp.3.671.175.535 dari realisasi tahun 2008 sebesar Rp.20.563.760.241, dan pada tahun 2010 terjadi penurunan realisasi yang cukup besar yaitu 72,56% atau sebesar Rp.17.584.081.954 menjadi Rp. 7.117.676.800 dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp.24.234.935.749. Selanjutnya pada tahun 2010-2012 realisasi retribusi daerah belum mencapai target yang ditentukan, meskipun pada tahun 2011-2012 Realisasi telah mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan tersebut belum dapat mencapai target yang diharapkan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp.6.649.853.795 dengan target Rp.7.117.676.800 naik 0,57% menjadi Rp.6.687.731.370 dengan target Rp.7.031.900,763 pada tahun 2011 dan dari tahun 2011 naik 3,17% menjadi Rp.6.899.399.102 dengan target Rp.7.662.957.438 pada tahun 2012.

Dilihat dari persentase efektivitas penerimaan terlihat pada tahun 2008 belum dapat mencapai tingkat sangat efektif dan 2009 sudah mencapai tingkat yang sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2010-2012 tingkat efektivitasnya menurun dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,04%, terlihat bahwa realisasi yang tidak mencapai target yang ditentukan menyebabkan efektivitasnya menurun. Penerimaan dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditentukan, (Halim, 2004:167). Pada tabel 1.3, dapat dilihat tahun 2008-2009 tingkat persentase kontribusi retribusi daerah sangat baik yaitu sebesar 50,39% pada

tahun 2008 dan 60,80% pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010-2013 tingkat persentase kontribusi mengalami penurunan menjadi sebesar 13,94% pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar 12,71%, dan pada tahun 2012 sebesar 10,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah kurang. Kontribusi dapat dikatakan sangat baik apabila persentase yang dicapai melebihi 50%, (Halim, 2004:163).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan kinerja penerimaan khususnya dari pihak pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi daerahnya agar dapat mencapai atau melebihi target yang ditentukan. Salah satu sektor yang mempengaruhi naik maupun turunnya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Persentase naik atau turunnya penerimaan dan efektivitas penerimaan retribusi daerah dapat dijadikan gambaran mengenai kinerja pemerintah khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar perlu berupaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan di bidang keuangan daerah khususnya sektor retribusi daerah yang lebih efektif agar penerimaan daerah terus meningkat dan mencapai target yang ditentukan sehingga dapat memperlancar pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar?
2. Bagaimana laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar?
3. Bagaimana kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Blitar?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar.
2. Mengetahui laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar.
3. Mengetahui kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar terhadap pendapatan asli daerah Kota Blitar.
4. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Blitar.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

##### **1. Kontribusi Akademis.**

- a. Kontribusi akademis memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu, yaitu ilmu administrasi bisnis dalam lingkup manajemen keuangan.
- b. Kontribusi akademis sebagai bahan pembanding atau referensi tambahan atas penelitian serupa di masa yang akan datang.

##### **2. Kontribusi Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, merupakan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Blitar, khususnya Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar.
- b. Sebagai bahan referensi untuk para peneliti yang berminat meneliti permasalahan di sektor retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- c. Memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sarjana di bidang Ilmu Administrasi Bisnis sebagai kepentingan penulis secara pribadi.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang apa yang menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian,

tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti. Sehingga mempunyai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penyajian data serta hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis data yang telah dibuat serta digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Dalam bab ini disajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian.

## **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang

ditemukan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pengembangan potensi penerimaan daerah.

